

---

## **Respon Turki Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Dilakukan Tiongkok Kepada Muslim Uighur Tahun 2018**

### **Rinta Khariza Pramesthi**

Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ringroad Barat Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Indonesia, 55183

Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, 55183

Email : [rkhariza@gmail.com](mailto:rkhariza@gmail.com)

### **Abstract**

*This paper seeks to explain what Tiongkok's human rights abuses have a wide range of condemnation from international agencies as well as many countries especially Turkey. Turkey has a different response to the violations that occur to the Muslim Uyghurs and also to the Muslims around the world. Turkey wants all of the Muslims in the world not to be treated arbitrarily and should be treated fairly like any other people on this earth. In addition to helping the Muslim Uyghurs over the equality of identity and religion, Turkey also aims to restore its image as the leader of Islamic countries in the world and want its country to return as it was during the heyday of the Ottoman Empire.*

**Key words : Abuses, Human Right, Tiongkok, Turki, Uighur Muslim, Countries**

### **Abstrak**

*Karya Tulis ini berusaha menjelaskan Pelanggaran HAM yang dilakukan Tiongkok yang mendapat berbagai kecaman dari badan internasional dan juga berbagai negara terutama Turki. Turki memiliki respon yang berbeda terkait pelanggaran yang terjadi kepada muslim uighur dan juga untuk muslim yang ada diseluruh dunia. Turki ingin umat muslim di dunia tidak diperlakukan semena-mena dan disetarakan perlakuannya dengan umat lain yang ada di muka bumi ini. Selain membantu muslim uighur atas persamaan identitas dan agama, Turki juga memiliki tujuan untuk mengembalikan citranya sebagai pemimpin negara-negara islam di dunia dan ingin negaranya kembali seperti pada masa kejayaan kerajaan ottoman.*

**Kata kunci : Pelanggaran, Hak Asasi Manusia, Tiongkok, Turki, Muslim Uighur, Muslim, Negara.**

---

---

## PENDAHULUAN

Turki adalah negara yang berada diantara dua benua, yaitu Asia dan Eropa. Memiliki letak geografis yang strategis membuat Turki dapat memainkan peran penting dan bertindak cermat di antara Asia, Eropa, Eurasia, Timur Tengah dan Afrika. Namun, sejak menjadi republik, Turki cenderung mengikuti kerangka nilai-nilai Eropa Barat walaupun tetap memasukkan kebudayaan Turki di dalamnya. Negara pertama Asia Tengah yang bermigrasi ke wilayah Anatolia dan Eropa. Turki pada awalnya menganut Samanisme dan ajaran Budha. Sesaat setelah terjadi Perang Talas pada Tahun 751 M akhirnya rakyat turki mayoritas memeluk agama islam. Turki sendiri turut menjadi anggota Organisasi Kerjasama Islam yang aktif mendukung perdamaian dan keamanan internasional. Dibentuknya OKI sendiri didorong oleh keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam, khususnya setelah unsur zionis membakar bagian dari Masjid Suci Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969 (Laylia, 2018).

Perpindahan masyarakat muslim Turki ke berbagai negara salah satunya etnis muslim uighur yang bermigrasi ke wilayah Xinjiang, Tiongkok. Xinjiang adalah daerah yang berhubungan dengan negaranegara Islam tetangga dalam banyak aspek, seperti asal etnis, agama, ekonomi, budaya, dan adat istiadat, tetapi tidak pernah memisahkan diri dari otoritas sentral dalam cara apapun. Hubungan ini terjalin melalui berbagai cara, seperti dakwah, perang agama terhadap Budhisme dan dukungan politik, di sinilah Islam menyebar. Sebelum tinggal di Turkistan Timur, Barat Tiongkok (teritorial Xinjiang saat ini), Uighur adalah kumpulan dari beberapa kabilah (suku) yang berpindah-pindah di Mongolia. Mereka sampai ke daerah ini setelah menguasai kabilah Mongolia serta perjalanan mereka ke arah Barat Laut Tiongkok pada abad 8 Hijriah. Selain muslim uighur, terdapat etnis muslim lain yang lebih besar yaitu muslim Hui yang berasal dari hasil asimilasi dan merupakan keturunan dari suku Han dengan bangsa Persia dan Arab sejak zaman Dinasti Tang. Kedekatan hubungan antara muslim Hui dengan etnis Han membuat ketimpangan sosial dan juga memicu konflik. Kedua etnis muslim tersebut berselisih karena faktor ekonomi dan kultural. (Anugerah, 2018).

Pemerintah Tiongkok juga dikabarkan memberi perlakuan berbeda terhadap etnis Uighur, ketimbang Hui yang sama-sama Muslim. Suku Hui dibebaskan berpuasa saat Ramadan, bebas berhaji, beribadah secara berjemaah dan membangun masjid, mendirikan

sekolah agama serta mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan mampu hidup dengan mapan. Sedangkan bagi orang Uighur justru sebaliknya. Pada 11 September 2001, rezim Tiongkok mengintensifkan pengejaran terhadap orang Uighur dan berhasil membawa beberapa orang Uighur, terutama dari Pakistan, Kazakhstan, dan Kyrgyzstan, di bawah apa yang disebut “Kampanye Internasional Melawan Terorisme” karena dianggap rentan terpapar radikalisme. Sebab, sejumlah kelompok perwakilan etnis Uighur dianggap tidak sejalan dengan pemerintah Tiongkok. Organisasi yang menjadi target Tiongkok adalah Kongres Uighur Dunia (WUC) dan Gerakan Kemerdekaan Turkestan Timur (ETIM). Yang terakhir bahkan dianggap sebagai kelompok teroris oleh Tiongkok. Dengan gelombang kelompok radikal seperti Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang dikhawatirkan tersebar di kalangan Uighur, pemerintah Tiongkok dirasa wajar jika merasa cemas. Meski sampai saat ini belum ada data pasti berapa jumlah etnis Uighur yang bergabung dengan ISIS (Nugroho, 2018).

Pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh muslim uighur adalah pelanggaran yang ada di Tiongkok lebih tepatnya di daerah Xinjiang. Awal mula terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan Tiongkok ini adalah karena adanya dugaan terorisme dan pemberontakan yang dituduhkan kepada kaum muslim Uighur. Sejumlah serangan teroris terjadi selama satu dekade terakhir, dan pemerintah menuding separatis di Xinjiang dan sekitarnya adalah pelakunya. Sekitar 200 orang, sebagian besar warga Etnis Han tewas dalam kerusuhan di Urumqi (CNN, 2018).

Belum lama setelahnya terjadi serangan penikaman yang menewaskan lima orang muslim uighur yang disusul penggrebakan besar-besaran oleh pemerintah Tiongkok terhadap sesuatu yang biasa mereka sebut sebagai kaum ekstremis dan separatis. Sejumlah mantan tahanan mengatakan tentang penyiksaan fisik maupun psikologis yang mereka alami di kamp-kamp penahanan. Seluruh keluarga mereka lenyap, para tahanan disiksa secara fisik serta mentalnya dan juga seperti berlangsungnya pengawasan yang sangat ketat terhadap warga muslim uighur (Hughes, 2018).

Menurut Human Rights Watch, suku Uighur dipantau secara sangat ketat. Mereka harus memberikan sampel biometrik DNA dan terjadi penangkapan terhadap mereka yang memiliki kerabat di berbagai negara yang dianggap oleh Tiongkok sebagai negara sensitif dalam artian terdapat kelompok-kelompok pemberontak atau bahkan teroris. PBB mengatakan bahwa hingga satu juta warga Uighur dan kelompok Muslim lainnya ditahan di wilayah Xinjiang barat dan di sana mereka menjalani program reedukasi, atau pendidikan

ulang. Pendidikan ulang yang dimaksudkan untuk memurnikan kembali fikiran mereka yang diduga oleh Tiongkok sudah terkontaminasi dengan fikiran yang dapat menjadikan mereka pemberontak dan hal itu dianggap mengancam Tiongkok sendiri. Orang-orang di kamp-kamp itu dipaksa belajar bahasa Mandarin, diajarkan untuk mengecam, bahkan meninggalkan keyakinan iman mereka (BBC, 2018).

Aparat Tiongkok juga melakukan pembatasan praktek keagamaan, melakukan indoktrinasi politik, hingga memasang kamera pengenalan wajah bagi warga Uighur. Jutaan orang lebih telah diawasi oleh kamera pengenalan wajah, pemindai *smartphone*, dan patroli polisi di setiap kesempatan. Beberapa orang harus menampung petugas pemerintah untuk tinggal di rumah mereka, dikirim untuk menilai kesetiaan mereka terhadap negara. Tiongkok menyebut langkah-langkah ini penting setelah serangan teroris yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir oleh para fanatik Uighur (BBC, 2018).

Pelanggaran HAM yang dilakukan Tiongkok mendapat berbagai kecaman yang jelas menentang tindakan tidak manusiawi tersebut. Kepala badan hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta agar pemerintah Tiongkok membuka akses bagi stafnya dan mengizinkan tim monitor masuk ke Tiongkok yang bertujuan untuk mengecek tuduhantuduhan terkait penerapakamp-kamp bagi muslim uighur dengan indoktrinasi politik yang tentunya sangat mengkhawatirkan (Riza, 2018).

Beberapa pemerintah dari negara-negara barat mengirim duta besar mereka ke Tiongkok untuk mempertanyakan tentang hak asasi manusia. Duta besar dari negara-negara Barat yang dipimpin oleh Kanada datang bersama-sama untuk melawan Tiongkok atas penindasan massal terhadap kaum Muslim [Uighur](#). Utusan duta besar meminta bertemu dengan ketua partai komunis di Xinjiang, Chen Quanguo. Chen dipindahkan dari Tibet untuk mengawasi kamp-kamp di mana mungkin sejuta Uighur telah dikirim ke sana untuk melakukan transformasi melalui pendidikan, banyak dari mereka ditahan untuk waktu yang tidak terbatas dengan tanpa adanya pengadilan (Economist, 2018).

Selain itu Amerika Serikat turut ikut mengecam tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan Tiongkok. Amerika Serikat telah mempertimbangkan untuk memberikan sanksi terhadap pejabat senior Tiongkok dan perusahaan-perusahaan yang terlibat dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas muslim Uighur. Pihak Amerika Serikat

sendiri akan memberikan sanksi berdasarkan Global Magnitsky Act, Undang-Undang federal yang memungkinkan pemerintah AS menargetkan pelanggar hak asasi manusia di seluruh dunia. Hukumannya adalah dengan membekukan aset, larangan perjalanan, dan larangan orang Amerika melakukan bisnis dengan mereka (Birdieni, 2018).

Hal yang berbeda diberikan oleh Negara-Negara muslim dunia, dalam konflik muslim uighur ini negara-negara Islam belum ada yang berani menentang secara langsung Tiongkok dikarenakan adikuasa yang dimiliki oleh Tiongkok terutama dalam hal perdagangan yang tentunya setiap negara harus tetap mementingkan kepentingan nasionalnya terlebih dahulu dan mengambil keputusan yang tidak membahayakan. Beberapa negara mengatakan tidak ingin ikut campur dan mendapat balasan dari Tiongkok. Bahkan tidak satupun pemerintah negara dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) secara terang-terangan memprotes Tiongkok atas penindasan mereka yang mengejutkan terhadap Muslim. Salah satunya yaitu Pakistan yang justru membela Tiongkok dengan mengatakan bahwa media yang dimiliki oleh negara-negara barat menjadikan kabar atau berita tentang uighur menjadi sesuatu yang sensasional (Birdieni, 2018).

Sebagai sesama muslim seharusnya negara islam memberika kontibusi dalam konflik ini dikarenakan kesamaan identitas atau keyakinan yang jelas mereka tahu itu merupakan hal yang tidak dapat di ganggu atau bahkan dipaksakan untuk ditinggalkan. Sebagai sesama juga rasa peduli seharusnya tercipta sebagaimana yang kita ketahui bahwa manusia hidup dan diciptakan menjadi makhluk sosial yang mana tentu membutuhkan satu sama lain dan tidak dapat hidup sendiri (Richardson, 2018).

Salah satu alasan negara muslim tidak ikut mengkecam kebijakan Tiongkok menurut Pakar kebijakan Tiongkok Michael Clarke dari Australian National University (ANU), kekuatan ekonomi Tiongkok dan takut mendapat balasan diduga menjadi faktor besar dalam diamnya negara berpenduduk mayoritas Islam untuk menyikapi isu Uighur. Selain itu, ada pula faktor pertimbangan politik, ekonomi dan kebijakan luar negeri. Investasi Tiongkok di negara-negara Timur Tengah dari kurun waktu 2005 hingga tahun 2018 telah berjumlah AU\$ 144,8 miliar. Sementara di Malaysia dan Indonesia, jumlahnya AU\$ 121,6 miliar pada periode yang sama, menurut lembaga think tank American Enterprise Institute. Beijing telah banyak berinvestasi di industri minyak dan gas milik negara Arab Saudi dan Irak, serta menjanjikan investasi berkelanjutan di seluruh Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Tampaknya hal ini yang

membuat Tiongkok berhasil menghentikan negara-negara ini secara terbuka mengkritik Beijing terkait Uighur (Merdeka, 2018).

Namun sikap lain diambil oleh Turki, Turki secara terang-terangan mengkecam tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan Tiongkok terhadap kaum Muslim Uighur. Turki beranggapan tindakan yang dilakukan Tiongkok tersebut telah melanggar norma manusiawi dan mengambil secara paksa kebebasan individu. Walaupun Turki dan Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir berjanji untuk bekerja sama dalam upaya keamanan dan melawan terorisme, menurut para ahli hubungan antara keduanya tidak diimbangi dengan rasa saling percaya. Hubungan antara Ankara dan Beijing menjadi tegang karena Turki mendukung kelompok-kelompok yang memerangi Presiden Suriah Bashar al-Assad sekutu Tiongkok dan menampung pengungsi Uighur (Indonesia, 2017).

Kelompok hak asasi manusia telah lama menuduh Tiongkok menindas sekitar berjuta-juta orang Uighur dengan pembatasan bahasa, budaya dan agama yang parah dan terus menerus mengobarkan kebencian dan radikalisasi. Dalam beberapa tahun terakhir ribuan orang Uighur telah meninggalkan Tiongkok untuk mencari suaka di Turki, banyak diantara mereka pergi ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok militan Islam atau hanya untuk menghindari penganiayaan dan menemukan rumah baru. Dengan banyaknya yang menentang dan tidak tinggal diam Tiongkok telah mendesak sekutunya termasuk Rusia dan Suriah untuk berbagi informasi tentang militan Uighur yang berperang di Suriah dan membantu mencegah kepulangan mereka untuk menyerang Tiongkok (Indonesia, 2017).

Ditambah lagi dengan adanya berita kematian penyair oleh salah satu orang uighur Abdurehim Heyit, yang hanya dijatuhi hukuman delapan tahun penjara karena salah satu lagunya hal tersebut memicu kemarahan publik di Turki, memaksa pemerintah untuk bereaksi. Belum lagi tindakan yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap muslim uighur juga mendapat kecaman dari rakyat Turki yang ditunjukkan dengan demonstrasi besar-besaran untuk mendukung muslim uighur. Sentimen anti Tiongkok ini berlangsung selama 10 hari. Bahkan demonstrasi tersebut juga menyerang restoran-restoran Tiongkok dan juga penyerangan terhadap turis-turis yang disangka berasal dari Tiongkok yang sedang berwisata bahkan diantaranya terluka (BBC, 2015). Kementerian Perdagangan dan Industri Turki juga menyerukan akan memboikot produk-produk yang diimpor dari Tiongkok karena dianggap

negara yang memproduksi tidak menghormati nilai-nilai kemanusiaan jadi harus mempertimbangkan lagi untuk konsumsi rakyatnya. (Fermalasari, 2015).

Turki mengatakan akan memprotes kebijakan Tiongkok yang secara paksa memenjarakan lebih dari satu juta Muslim Uighur. Turki menyebutnya sebagai tindakan buruk yang sangat tidak berperasaan bagi kemanusiaan. Pernyataan dan perubahan sikap Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan membuat Beijing marah (Dayana, 2019).

## **KERANGKA TEORITIK**

Teori merupakan suatu upaya untuk menjawab suatu pertanyaan mengapa dari sebuah rumusan masalah (mas'ood, 1994) Selain menggunakan teori, bisa juga menggunakan konsep ataupun model. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan konsep Neo Ottomanisme.

Konsep Neo Ottomanisme merupakan soft diplomacy yang dimiliki Turki saat ini. Di dalam buku *Turkey's Middle East Policies: Between Ottomanisme and Kemalisme* Tahun 2008 yang ditulis oleh Omer Taspinar mengatakan terdapat tiga indikasi yang dapat menjelaskan konsep Neo Ottomanisme. Pertama yaitu Turki ingin mengembalikan citranya sebagai negara Islam yang memiliki kekuatan otoriter seperti pada masa kejayaan Turki Usmani. Dengan adanya keinginan Turki tersebut Turki tidak merubah citra Turki modern menjadi Turki pada masa Turki Usmani yang dulu justru Neo Ottomanisme tetap melanjutkan kebijakan tentang sistem Islam yang moderat dan sekuler pada keperluan domestik serta meningkatkan perhatian terhadap isu-isu global.

Turki memulai dengan menunjukkan perannya seperti mengambil posisi kepemimpinan dalam Organisasi Kerjasama Islam, menghadiri beberapa konferensi Liga Arab, menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Iran, Irak, dan Suriah juga meningkatkan ekonomi, politik, dan diplomatiknya hubungan dengan sebagian besar negara Arab dan Muslim. Dengan contoh juga seperti halnya pada kasus muslim Uighur hanya Turki negara Islam yang berani menentang dan dengan aktif merespon konflik tersebut. Dapat ditunjukkan bahwa Turki ingin menjadi negara yang paling kuat di antara negara-negara Islam sama halnya ketika kejayaan Turki Usmani (Taspinar, 2008, hal. 2).

Yang kedua yaitu Turki yang memiliki percaya diri bahwa negaranya mampu melaksanakan kebijakan luar negerinya dengan baik. Sebagaimana diketahui bahwa Neo Ottomanisme memiliki tujuan untuk menjadikan Turki sebagai negara yang kuat dan mampu diandalkan dalam berbagai aspek seperti aspek politik, ekonomi, dan budaya. Berbeda dengan Kemalisme Ideologi yang idusung oleh Mustafa Kemal yang justru menganggap bahwa Neo Ottomanisme membahayakan kepentingan nasional Turki dalam memperluas hubungan terhadap Timur Tengah dan Asia. Kemal lebih memusatkan perhatiannya pada negara-negara barat saja. Tentu hal tersebut justru yang membuat kepentingan nasional Turki tidak aman karena hanya memusatkan perhatian pada satu sisi saja (Taspinar, 2008, hal. 15).

Yang ketiga, selain merangkul negara-negara islam seperti Timur Tengah Neo ottomanisme juga ingin Turki merangkul negara-negara barat untuk menjadi mitranya yang mana mengingat julukan Turki dengan *The sick man of Europe* bahwa Turki merupakan bagian dari Eropa Barat. Dengan gambaran Turki harus memosisikan dirinya atau bermuka dua. Turki memiliki warisan-warisan ottoman yang bukan berarti berencana mengislamkan Turki dan kebijakan luar negeri Turki. Turki ingin berlaku adil terhadap negara islam dan negara barat dengan memosisikan dirinya sebaik mungkin (Taspinar, 2008, hal. 15-16).

Sedangkan pada sudut pandang lain Turki menggunakan neo ottomanisme dengan landasan konstruktivisme yang mana dapat dijadikan salah satu alasan Turki untuk membela muslim uighur karena persamaan identitas. Jika realis menekankan pada dimensi material berupa distribusi kapabilitas antar negara, konstruktivis menekankan pada dimensi tidak tampak berupa distribusi pengetahuan atau intersubektivitas (*shared understanding*) antar negara. Salah satu konsep kunci konstruktivis untuk memahami fenomena hubungan internasional adalah identitas. Menurut Alexander Wendt dalam buku *Social Theory Of International Politics* Tahun 1999, identitas lebih dulu membentuk kepentingan nasional suatu negara. Dalam konteks negara, identitas biasanya merujuk pada serangkaian sejarah yang dimiliki negara pada masa lampau yang didasari oleh nilai-nilai tertentu yang dianut sebagai pedoman atau panduan dalam bersikap dan bertindak. Sebagaimana Turki, negara dua benua ini memiliki sejarah panjang pada masa Turki Utsmani dahulu. Keadaan tersebut membuat Turki saat ini memiliki nilai-nilai yang telah terinternalisasi ke dalam masyarakatnya. Meskipun demikian, agen (aktor) dalam pandangan konstruktivis pada dasarnya juga memiliki peranan dalam mengubah struktur yang membentuk tindakan atau kebijakan negara. Turki Usmani melahirkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan dengan identitas dan kepentingannya seperti menciptakan perdamaian dan melindungi muslim yang tertindas sesuai dengan respon Turki yang aktif dalam konflik muslim uighur. Secara singkat identitas yang digunakan pada masa Turki Usmani dapat disebut dengan Sufisme atau Ottomanisme (Hidayati, 2018).

## **METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan metode pengumpulan data yang bersifat studi pustaka untuk lebih mengakuratkan penelitian dari sisi keilmuan. Metode ini dilaksanakan dengan topik permasalahan yang diangkat melalui penelitian terhadap buku, tulisan, artikel skripsi sebelumnya. Penulis juga mencari data yang relevan yang bersumber dari media elektronik yang reliabel.



## HASIL DAN ANALISIS

### UPAYA DAN BANTUAN YANG DILAKUKAN TURKI UNTUK MUSLIM UIGHUR

Turki sebagai negara yang mulai menunjukkan perannya di dalam dunia islam dan juga dunia internasional memiliki upaya untuk membantu saudara sesama muslimnya di Tiongkok yang mengalami pelanggaran HAM. Sebagai rasa kemanusiaan dan hal tersebut dapat dijadikan sebagai alat untuk menjadikan Turki pemimpin dunia islam di mata dunia seperti pada masa kejayaan Kerajaan Ottoman.

#### A. Upaya Turki Untuk Mengembalikan Citranya Sebagai Pemimpin Dunia Islam Berdasarkan Ideologi Ottoman

Pada masa Kekhilafahan Turki utsmani yakni kekaisaran Ottoman pemerintahan Turki pernah memimpin hampir semua wilayah bagian Islam didunia. Berawal dari ibukota kekaisaran yang berada di Konstantinopel yang sekarang bisa disebut dengan Istanbul dan juga dikenal sebagai tempat yang aman bagi umat beragama tidak hanya Islam tetapi juga negara-negara lainnya. Sultan Ottonom pada masa itu mengklaim memiliki gelar Khlifa muslim untuk pemimpin Ottoman, namun pada saat runtuhnya kekaisaran Ottoman yang diganti dengan Republik Turki pada tahun 1924, pemimpin Republik Turki pada saat itu Mustafa Kemal Ataturk memerintahkan untuk menghapus pengklaiman terhadap gelar Khalifah Muslim untuk pemimpin Ottoman.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, pemerintah Turki yang dipimpin oleh Erdogan mengambil langkah dan peran yang lebih penting dalam keterlibatan Turki untuk negara-negara Muslim, selain itu pemerintahan Erdogan juga memimpin negara Muslim yang terlibat didalam Organisasi Islam yakni OKI yang didalamnya terdapat hampir 59 Negara.

Turki kembali melihat kebelakang tentang seperti apa negaranya pada masa dahulu. Turki memiliki sejarah yang sangat penting dan berpengaruh pada masa kerjaan Turki Usmani atau kekaisaran ottoman yang pada saat itu menjadi bagian terpenting dari peradaban islam di dunia. Pada masa kerajaan Turki Ottoman pada masa dinasti Usmani yang memiliki kejayaan dan merupakan kerajaan besar yang mampu bertahan dengan waktu yang cukup lama. Kerajaan Turki Ottoman mencakup

tiga benua yaitu benua Asia, Afrika dan Eropa yang meliputi Bizantium, Hungaria, Rusia, Irak, Suriah, Kaukasus, Palestina, Mesir, negara-negara di Semenanjung Balkan, Pulau-pulau di Mediterania Timur, beberapa negara Arab dan Afrika Utara. Pada masa kejayaannya itulah yang dapat membuat kehidupan rakyatnya makmur dan sejahtera jelas merupakan pencapaian yang sangat baik untuk sebuah kerajaan (Ergec, 2014, hal. 141).

Pencapaian yang dicapai oleh Kerajaan Turki usmani tidak lepas dengan adanya kebijakan dari para pemimpinnya yang menganut nilai-nilai islam sufisme dan menjadikannya sebuah identitas. Konsep sufisme yang dianut oleh pemimpin kerajaan Turki Usmani inilah yang mendasari kejayaannya dalam berbagai aspek kehidupan seperti pada bidang spiritual, politik, militer dan intelektual yang sudah ada berabad-abad lamanya (Ergec, 2014).

Sufisme sendiri merupakan pandangan hidup yang memiliki semangat spiritual yang tinggi dalam islam. Karena dalam hal ini sufisme mampu melengkapi kekakuan formalitas islam ortodoks di masyarakat muslim. Sufisme memiliki peran penting dalam pembentukan masyarakat muslim dengan mendidik, mengajarkan, dan memperdalam kesadaran spiritual umat islam dengan melalui serangkaian latihan-latihan spiritual (Muhammad, 2014, hal. 89).

Dengan adanya konsep sufisme dalam identitas kerajaan Turki Ottoman tersebut membuat kekuatannya sebagai kerajaan besar untuk memimpin dunia islam. Sehingga apapun masalah yang dihadapi dunia islam merupakan kepentingan turki Usmani untuk melindungi dunia islam. Dapat diambil contoh seperti saat Turki Usmani melindungi kerajaan Aceh dari jajahan Portugis dengan mengirimkan jenissari yang merupakan sebutan untuk bala pasukan kerajaan. Dengan begitu kerajaan Aceh dapat bertahan dari serangan-serangan Portugis pada kala itu.

Sejarah dari Kerajaan Turki ottoman adalah tantangan modernitas yang mana Turki sebagai negara pemimpin dunia islam harus merangkul dunia-dunia barat khususnya Eropa agar dapat dikenal dan bersaing dalam hal ekonomi, politik, dan budaya pada kala itu. Berawal dari dihapuskannya kekhilafahan oleh Mustafa Kemal Athaturk dengan sistem pemerintahan yang baru berupa pemerintahan republik Turki sekuler yang berjalan hingga saat ini. Perubahan sistem pemerintahan tersebut dianggap langkah yang tepat untuk menghadapi tantangan modernitas di dunia dan

juga dengan perubahan tersebut Turki mempercayai perubahan tersebut dapat memperbaiki distribusi otoritas politiknya sehingga mesin perubahan bisa dijalankan (Quatert, 2005, hal. 106).

Dengan menoleh ke masa lalu, Recep Tayyip Erdogan, presiden Turki sekarang ini memiliki keinginan untuk mengembalikan citra negaranya sama seperti pada saat kejayaan kerajaan ottoman. Seperti kerajaan ottoman yang dilihat sebagai pemimpin dan pelindung negara islam. Tampaknya juga Erdogan ingin suara negaranya lebih didengar di dunia internasional. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengembalikan citra tersebut diantara lain membuka kerjasama dalam berbagai bidang dengan negara-negara yang ada didunia. Dalam lingkup nasionalnya sendiri Erdogan mengembalikan kebebasan rakyatnya untuk berpakaian muslim dan berhijab bagi perempuan dengan membebaskan jilbab di berbagai sektor, larangan keras untuk minuman berakohol, dan dukungannya terhadap Palestina. Pada sebelumnya mahasiswa dilarang memakai jilbab ke kampus dan hal itu turut dirasakan juga oleh putri dari Erdogan sehingga putrinya harus dikuliahkan ke Amerika (Junaidi, 2016).

Turki dalam beberapa tahun terakhir ikut aktif dan perhatian terhadap isu-isu global. Diawali dengan ikutnya Turki pada konferensi liga arab dan menjalin beberapa hubungan kerjasama dengan Iran, Irak, dan Suriah. Bahkan Turki menunjukkan seperti mengambil posisi kepemimpinan dalam Organisasi Kerjasama Islam dari berbagai aspek juga. Turki tingkatan kerjasama seperti pada bidang politik, ekonomi, dan diplomatiknya dengan sebagian besar negara muslim dengan begitu terlihat bahwa Turki ingin negaranya kembali menjadi negara yang berpengaruh bagi dunia muslim. Selain meningkatkan hubungannya dengan dunia islam, Turki juga merangkul negara-negara barat karena mengingat sejarah Turki yang terdiri dari beberapa wilayah dengan 3 benua dan salah satunya yaitu bagian dari Eropa Barat (Junaidi, 2016).

Pertumbuhan ekonomi Turki mengalami kenaikan pesat pada tahun 2011 dengan begitu Turki sempat diberi julukan sebagai macan baru karena pergerakannya diantara anggota G20 merupakan yang paling cepat. Padahal sebelum Erdogan menjadi presiden Turki sedang mengalami krisis. Dalam arti lain pada masa kepemimpinan Erdoganlah pertumbuhan ekonomi membaik dan dengan begitu membuat Erdogan semakin populer. Walau setelahnya perekonomian Turki pada 2014 melambat yang berdampak dengan melemahnya mata uang Lira dan meningkatnya pengangguran. Namun semua itu dapat diatasi lagi pada pertengahan

tahun 2016. Turki mampu membayar hutang kepada IMF (international Monetary Fund) sebesar US\$ 24 Milyar dan untuk pertama kalinya setelah 19 akhirnya tahun Turki menjadi negara yang bebas hutang. Bahkan Turki memiliki peringkat ke 16 sebagai negara dengan perekonomian terbaik di dunia (Christiastuti, 2018).

Pada kasus muslim uighur inilah Turki memerankan kepemimpinannya didunia islam karena tidak satupun negara islam yang maju untuk kasus pelanggaran HAM terhadap muslim uighur. Justru seperti negara islam besar seperti Arab Saudi mengeluarkan statement yang mengarah pada pro Tiongkok. Arab Saudi mengatakan bahwa kasus tersebut merupakan masalah internal jadi tidak seharusnya negara lain megikut campuri urusan mereka. Dengan begitu Turki semakin kuat untuk menunjukkan citra pemimpin dunia muslim yang dapat melebihi Arab Saudi (Christiastuti, 2018).

Turki memang belum sekuat Tiongkok, Rusia dan Amerika, namun Erdogan sebagai presiden Turki mengatakan ia yakin bahwa keunggulan peradaban muslim dan sejarah islam yang agung suatu hari akan bangkit kembali diatas reruntuhan puing-puing yang pernah hancur sebelumnya. Berbekal keberhasilan pembangunan negerinya, Turki terus maju sebagai pemimpin dunia islam yang dengan lantang berani mengeluarkan suara kerasnya untuk membela hak-hak negara muslim didunia. Bantuan yang diberikan Turki terhadap negara-negara islam dari Asia hingga Afrika yang membutuhkan bantuannya melalui beberapa Non Governement Organization (NGO) seperti IHH dan TIKA(Zulhairi, 2018).

Kemajuan Turki didalam kepemimpinan Erdogan dalam beberapa waktu terakhir membuat negara barat tidak senang ditambah lagi dengan terpilihnya kembali Erdogan sebagai presiden pada 2018. Barat menilai Erdogan sebagai presiden yang senang menentang kekuatan-kekuatan besar dunia. Namun pemimpin Bosnia, Bakir menyatakan bahwa Erdogan merupakan pemimpin yang memang sudah lama di idamkan oleh seluruh umat muslim dipenjuru dunia. Maka Turki tidak perlu takut dengan barat karena hal ini merupakan kebangkitan dari dunia Islam dan sebagai dunia islam yang modern dan progresif tanpa mengubah nilai-nilai Islam dan keimanan yang sudah dicontohkan oleh ajaran Nabi(Muslim, 2018).

Dalam peringatan Hari Buruh Internasional, Erdogan sebagai presiden Turki menyatakan apresiasianya terhadap seluruh buruh di dunia juga buruh di Trki yang

turut berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan Turki. Pada hari tersebut dijadikan sebagai hari libur untuk memperingatinya. Erdogan juga menyatakan bahwa pemerintahannya mengadopsi beberapa langkah dan program untuk menambah lapangan kerja dan mengurangi jumlah pengangguran di Turki. Erdogan mengatakan bahwa pada hari buruh dunia tersebut diperingai dengan persatuan dan perdamaian bagi seluruh buruh di dunia dan akan mendukung lingkungan kerja yang adil (Turkinesia, 2019)

Sebagai negara Islam yang mulai menunjukkan kekuatannya di forum internasional dalam World Economic forum di Davos Switzerland, Pemimpin Turki yakni Erdogan mengeluarkan statement yang membuat presiden Israel pada saat itu yang dipimpin oleh Simon Peres malu. Erdogan menyebutkan bahwa dalam forum tersebut Peres berbicara dengan nada terlalu tinggi lalu Erdogan juga menyebutkan bahwa dirinya tidak akan membalas dengan nada tinggi. Nada tinggi tersebut disebut oleh Erdogan sebagai rasa bersalah Israel atas beberapa kejadian yang terjadi pada beberapa tahun terakhir. Ditambah lagi teguran dari Erdogan yang menyatakan bahwa Peres merupakan orang senior yang sangat mengerti tentang caranya membunuh apalagi caranya membunuh anak-anak Gaza yang tak bersalah itu. Hubungan antara Turki dan Israel tegang setelah pemerintah Turki mengecam konflik 2008-2009 antara Israel di Gaza. Diketahui sembilan warga Turki tewas selama operasi militer oleh tentara Israel di perairan internasional. Operasi yang menyebabkan ketegangan antara kedua negara tersebut dikenal sebagai insiden Gaza Flotilla (Islamedia, 2018).

Dalam forum internasional lainnya seperti OKI (Organisasi Kerja sama Islam), Turki menyerukan ajakan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota negara Palestina dalam KTT OKI yang diselenggarakan di Istanbul tersebut. Dalam KTT tersebut juga mendesak PBB untuk menyatakan bahwa AS yang harus bertanggung jawab atas pernyataannya tentang Yerusalem dan rencananya yang akan memindahkan duta besar AS untuk Israel ke Yerusalem (Sadikin, 2017).

Turki juga mengajak negara-negara dalam KTT OKI tersebut untuk tidak menerima Amerika Serikat karena telah berpihak sepenuhnya pada Israel dengan membantu Israel untuk menduduki Yerusalem dan menetapkannya sebagai ibu kota Israel. Langkah yang diambil oleh Presiden Amerika Serikat tersebut membuat pertempuran ganas yang terjadi di Palestina. Presiden Turki, Erdogan menyatakan pernyataan yang ditujukan kepada Trump untuk tidak mencoba mengambil alih operasi zionis Israel namun jika Trump tetap bersikeras untuk melakukannya maka

resiko yang akan ditanggung amatlah berat. Seharusnya dalam kasus ini PBB mengambil peran dalam perundingan tersebut untuk memberikan dorongan terhadap Isarel untuk menyerahkan Yerussalem pada Palestina (Siregar, 2017).

### **Tanggung Jawab Turki Untuk Membantu Muslim Uighur pada Pelanggaran HAM Yang Dilakukan Oleh Tiongkok**

Penderitaan umat muslim semakin hari semakin bertambah. Belum berakhir konflik Palestina dengan Israel, kasus kelaparan umat muslim di Yaman, Genosida umat muslim Rohingya di Myanmar sekarang justru penderitaan muslim lain terjadi kepada etnis muslim uighur di Tiongkok. Pelanggaran HAM terhadap etnis muslim uighur yang didasari karena alasan ras, suku, dan agama. dengan begitu harapan terbesar untuk membebaskan penderitaan umat muslim di dunia adalah bantuan dari negara-negara di dunia terutama negara dunia islam.

Negara-negara di dunia islam tidak satupun ada yang berani membahas tentang pelanggaran HAM yang dilakukan Tiongkok terhadap muslim uighur. Dikarenakan beberapa negara di dunia islam memiliki hubungan diplomatik yang membuat ketergantungan dan bahkan memiliki hutang yang sangat besar dengan Tiongkok. Bahkan negara islam besar seperti Arab Saudi tidak mau membela muslim uighur karena dinilai hal tersebut merupakan masalah internal Tiongkok, yang pada dasarnya dapat dilihat kerjasama antara Arab Saudi dengan Tiongkok cukup banyak dalam berbagai aspek (Merdeka, 2018).

Sebagai negara yang penduduknya mayoritas muslim dan merupakan negara islam berpengaruh didunia, Turki sebagai negara islam memberikan bantuan kepada sesama umatnya. Terlebih lagi muslim uighur adalah salah satu klan Turki yang bermigrasi ke Asia Tengah tepatnya di wilayah Xinjiang, Tiongkok. Dulunya wilayah Xinjiang bernama Turkistan Timur sebelum akhirnya di ambil alih oleh pemerintah Tiongkok. Muslim uighur bermigrasi ke Tiongkok pertama kali karena faktor dagang. Yang mana orang keturunan Turki menikah dengan orang Tiongkok lalu menghasilkan keturunan yakni muslim uighur. Bahasa yang dipakai yaitu bahasa Turki dengan menggunakan huruf arab. Mereka awalnya terdiri dari beberapa agama dan akhirnya masuk islam. Mayoritas bermazhab Hanafi, berideologi Sunni, dan sebagian lagi Syi'ah Isma'ilyah (Hidcom, 2018).

Turki yang dipimpin oleh Erdogan menuding Tiongkok melakukan pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur dan meminta Tiongkok untuk memenuhi hak penduduk Muslim Turkis di daerah Xinjiang. Namun, Tiongkok membantah dan menuding penyerangan yang terjadi di Xinjiang dalam beberapa tahun terakhir merupakan ulah dari Gerakan Turkistan Timur (Hidcom, 2018).

Pemerintah Tiongkok berupaya membujuk Turki untuk ikut andil dalam memerangi kelompok yang di anggap oleh Tiongkok sebagai kelompok militan Turkistan Timur yang berada di Xinjiang, hal ini disebabkan karena selain hanya Turki yang menjadi satu-satunya negara yang menaruh perhatian khusus terhadap konflik di Xinjiang dan dugaan pelanggaran HAM terhadap Uighur. Pemerintah Tiongkok berharap Turki benar-benar menghargai kepentingan Tiongkok dalam melindungi keamanan dan kedaulatan nasionalnya, Tiongkok juga meminta Turki untuk lebih adil dan ikut menjaga situasi kerja sama strategis kedua Negara dengan cara memberantas teroris Turkistan Timur (CNN Indonesia, 2019).

Sebenarnya perbedaan perlakuan pemerintah Tiongkok kepada muslim uighur sudah lama terjadi yang dapat dilihat bahwa pemerintah Tiongkok khawatir apabila muslim uighur menguasai Xinjiang dan memisahkan diri dari RRC kala itu. Muslim uighur dinilai sebagai pemberontak. Makin diperkeruh dengan adanya etnis kiriman pemerintah Tiongkok, etnis Han yang dimaksudkan agar wilayah Xinjiang tidak hanya dikuasai oleh muslim uighur saja. Tidak hanya itu, Pemerintah Tiongkok pun memiliki kebijakan ekonomi yang lebih mengutamakan etnis Han (Mohamad, 2015).

Permasalahan terhadap Kamp yang dibentuk oleh Tiongkok terhadap Uighur dengan alasan menjaga keamanan Negara masih belum menemukan titik terang dalam upaya penyelesaian, Tiongkok bersikeras menganggap pelanggaran yang dilakukannya merupakan perang terhadap kaum radikal Islam meskipun Tiongkok telah mendapat banyak kecaman dan tuduhan dari Negara-negara besar dunia termasuk Turki. Pemimpin Turki secara terbuka menuding bahwa Tiongkok telah melakukan pelanggaran dengan melakukan Genosida terhadap etnis Uighur dan memintak badan Internasional PBB untuk menyelidiki secara mendalam pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Tiongkok (Damhuri, 2019).

Dengan adanya penindasan terhadap muslim uighur tersebut Turki langsung mengeluarkan kecamannya dengan keras dan juga mengirimkan bantuan melalui beberapa NGOnya. Bahkan didalam Turki terdapat tiga juta pengungsi Suriah yang

lari dari perang dan merawatnya dengan baik. pada kasus lain, saat Qatar dijauhi dan diserang oleh beberapa negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirat, Bahrain dan Mesir, Turki tidak semena-mena mengikuti karena kejadian tersebut dianggap adalah sesuatu yang diinginkan oleh Israel yaitu agar dunia islam hancur. Turki terus mengajak dunia Islam untuk bersatu kembali dan juga menyuarakan reformasi PBB (Zulkhairi, 2018).

Kekuatan negara-negara di dunia didominasi oleh negara seperti Amerika, Russia, Tiongkok, Perancis, dan Inggris. Namun presiden Turki tidak menerima bahwa negara-negara itulah yang memegang hak veto di dunia yang sebesar ini. Negara yang diberikan hak veto merupakan negara-negara yang tidak berpenduduk muslim yang artinya dunia sudah memandang umat islam dengan sebelah mata. Namun sampai saat ini hal semacam ini tidak pernah difikirkan dan diperjuangkan oleh dunia Islam lainnya. Disinilah Turki berperan menyuarakan hak umat muslim di dunia agar disetarakan dengan seluruh umat yang ada di dunia. Erdogan menyatakan bahwa umat muslim tidak perlu takut dengan kekuatan apapun yang ada di dunia, kita hanya membungkuk dan patuh kepada Allah SWT ketika rukuk dan sujud didalam solat kita (Zulkhairi, 2018).

Di dalam masyarakat Turki sendiri sangat sensitif mengenai penindasan terhadap muslim uighur. Dapat diketahui bahwasannya masyarakat Turki berdemo dan melakukan hal-hal anarki lainnya. Para demonstran membakar bendera Tiongkok, menyerang beberapa wisatawan yang menurut mereka berasal dari Tiongkok bahkan diantaranya terluka, dan merusak Happy Chinese Restaurant milik Cihan Yavuz yang berada di Istanbul. Aksi yang dilakukan masyarakat Turki yang tidak terima terhadap perlakuan pemerintah Tiongkok tersebut disebut dengan gerakan anti Cina. Pada dasarnya aksi tersebut untuk membuktikan kesolidaritasan terhadap kaumnya yang ditindas di negara orang (BBC NEWS, 2015)

Otoritas Tiongkok mengeluarkan pernyataan kepada setiap warga Tiongkok yang berada di Turki untuk lebih waspada dan berhati-hati, hal ini didasari oleh ketegangan yang terjadi antara Turki dan Tiongkok setelah Turki melontarkan kritikan dan peringatan keras terhadap Tiongkok dalam pelanggaran HAM yang dilakukan Tiongkok terhadap Muslim Uighur. Peringatan tersebut dirilis langsung



oleh Kedutaan Besar Tiongkok untuk Turki sehari setelah Kritik keras yang dilontarkan oleh Turki (BBC NEWS, 2015).

Kritikan yang dilontarkan Turki kepada Tiongkok merupakan imbas dari perlakuan Tiongkok terhadap Muslim Uighur, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan sikap yang dilakukan Tiongkok merupakan sikap yang sangat memermalukan kemanusiaan. Turki secara langsung meminta Organisasi dan Komunitas Internasional yang bergerak dibidang HAM untuk mengambil langkah yang lebih efektif dalam mengakhiri tragedy kemanusiaan di Xinjiang (Christiastuti, 2018).

Turki menunjukkan solidaritasnya untuk muslim uighur dengan menerima dan mengizinkan imigran uighur yang masuk ke negaranya untuk lari dari penindasan yang dialaminya di Xinjiang. Di tempat dimana muslim uighur ditampung telah dijamin keamanannya oleh pemerintah Turki. Sejumlah warga uighur yang berada atau tinggal di Turki mengencarkan kampanye “Me Too Uighur” untuk mendesak pemerintah Tiongkok agar membebaskan saudarasaudara mereka yang masih ditahan di kamp-kamp penahanan muslim uighur. Mereka juga meminta tanggung jawab pemerintah Tiongkok karena kehilangan kontak atau akses untuk berhubungan dengan keluarga mereka dan tidak tahu bagaimana kabar dari keluarga mereka dengan merilis bukti video tentang saudara mereka yang dikabarkan hilang tersebut masih hidup (CNN Indonesia, 2019).

## DAFTAR PUSTAKA

- Anugerah, P. (2018, Desember 19). *Muslim Uighur dan kasus-kasus persekusi lain yang 'terabaikan'*. Retrieved from BBC Indonesia: <https://www.bbc.com>
- BBC. (2018, Desember 18). *Yang Perlu Diketahui tentang China dan Perlakuan pada Muslim Uighur*. Retrieved from BBC News: <https://news.detik.com>
- BBC NEWS. (2015, Juli 9). *Bersitegang soal etnis Uighur, hubungan Cina-Turki memburuk*. Retrieved from <https://www.bbc.com>
- BBC NEWS. (2015, Juli 29). *Di tengah ketegangan terkait suku Uighur, Erdogan tiba di Cina*. Retrieved from [www.bbc.com](http://www.bbc.com)
- Birdieni, B. (2018, September 19). *Amerika Ancam Cina Terkait Muslim Uighur*. Retrieved from Gatra.com: <https://www.gatra.com>
- Christiastuti, N. (2018, Juni 28). *Pencapaian Erdogan Selama 15 Tahun Terakhir Berkuasa di Turki*. Retrieved from <https://news.detik.com>
- CNN. (2018, Desember 28). *Jejak Konflik Etnis Uighur dan Pemerintah Cina*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com>
- CNN Indonesia. (2019, Mei 17). *China Rayu Turki Lawan 'Kelompok Radikal' di Xinjiang*. Retrieved from [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)
- Damhuri, E. (2019, Februari 11). *Kamp Uighur dan Turki yang Makin Tegas ke Cina*. Retrieved from [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)
- Dayana, A. S. (2019, Februari 12). *Cina Tepis Tudingan Soal Kematian Abdurahman Heyit di Xinjiang*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id>
- Economist, T. (2018, November 23). *Negara-negara Barat Mulai Serang China Soal Penindasan Muslim Uighur*. Retrieved from Mata-Mata Politik : <https://www.matamatapolitik.com>
- Ergec, N. E. (2014). To creation discourse by the press: Neo Ottoman discourse. *European Journal of Research on Social Studies*, 141.
- Fermalasari, Z. F. (2015). Keterlibatan Turki dalam Konflik Xinjiang 2009. *Thesis*, 4.
- Handayani, Y. (2016). Perempuan dan Hak Asasi Manusia. *RechtsVinding Online*, 1.
- Hidayati, S. Y. (2018). Kebijakan Open Door Policy Turki Terhadap. *Repository UMY*, 13.
- Hidcom, A. (2018, Desember 21). *Mengenal Muslim Uighur*. Retrieved from <https://www.hidayatullah.com>
- Hughes, R. (2018, Desember 19). *Muslim Uighur dan perlakuan Cina terhadap mereka, yang perlu Anda ketahui*. Retrieved from BBC News: <https://www.bbc.com>

- Indonesia, V. (2017, Agustus 04). *Kunjungi Beijing, Menlu Turki Berjanji akan Basmi Militan Uighur*. Retrieved from VOA : <https://www.voaindonesia.com>
- Islamedia. (2018, Juni 13). *Erdogan Pernah Permalukan Presiden Israel Simon Peres Di Forum Dunia*. Retrieved from [www.islamedia.id](http://www.islamedia.id)
- Junaidi, A. (2016). Kebijakan Recep Tayyib Erdogan dan Islamisme Turki Kontemporer. *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 147.
- Laylia, S. N. (2018). Respon Turki Terhadap Pelanggaran HAM Minoritas Muslim. *JOM FISIP*, 2.
- Mas'ood, M. (1994). Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi. In M. Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi* (p. 169). Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
- Merdeka. (2018, Desember 27). *Ini Alasan Negara Muslim Bungkam Terhadap China Dalam Isu Uighur*. Retrieved from Merdeka.com: <https://www.merdeka.com>
- Mohamad, A. (2015, Juli 14). *Ini Alasan Pemerintah Cina Membenci Muslim Uighur*. Retrieved from <https://www.merdeka.com>
- Muhammad, A. (2014). Relasi Sufisme dengan Modernitas Dalam Perspektif 'Abd Al Halim Mahmud. *Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 89.
- Nugroho, B. P. (2018, Oktober 12). *Kontroversi Perlakuan China terhadap Muslim Uighur*. Retrieved from detikNews: <https://news.detik.com>
- Quatert, D. (2005). *The Ottoman Empire 1700-1922*. Cambridge University Press.
- Richardson, S. (2018, November 15). *Kenapa Negara-Negara Islam Tidak Membela Muslim Uighur?* Retrieved from Mata-Mata Politik: <https://www.matamatapolitik.com>
- Riza, B. (2018, September 11). *Badan HAM PBB Minta Cina Buka Pintu Soal Etnis Uighur*. Retrieved from Tempo.co: <https://dunia.tempo.co>
- Sadikin, R. (2017, September 19). *Ancaman 'Mengerikan' Presiden Turki Erdogan Jika Trump Ambil Alih Operasi Israel*. Retrieved from [m.tribunnews.com](http://m.tribunnews.com)
- Siregar, L. P. (2017, Desember 13). *Presiden Erdogan serukan OKI mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Palestina*. Retrieved from <https://www.bbc.com>
- Taspinar, O. (2008). *Turkey's Middle : Between Neo Ottomanism and Kemalism*. Washington DC: Carnegie Endowment.
- Turkinesia. (2019, Mei 1). *Hari Buruh Internasional: Erdogan Apresiasi Peran Buruh Dalam Pertumbuhan Turki*. Retrieved from [www.Turkinesia.net](http://www.Turkinesia.net)
- Zulkhairi, T. (2018, Juni 29). *Erdogan 'Magnet' Menyatunya Dunia Islam*. Retrieved from <https://news.detik.com>